

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **OPTIMALISASI MANAJEMEN KULTUR PADA SATUAN INTELIJEN DI WILAYAH PAPUA DAN PAPUA TENGAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**

Jeffry Antonius Bojoh<sup>1</sup>

Agus Subagyo<sup>2</sup>

Agustina Setiawan<sup>3</sup>

**1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani**

Email Korespondensi : jeffrybojoh@gmail.com

### **Abstrak**

Papua dan Papua Tengah menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk dinamika sosial-budaya yang beragam dan aktivitas separatis yang signifikan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan manajemen budaya dalam operasi intelijen di wilayah-wilayah ini serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas operasi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun unit intelijen memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika lokal dan dukungan teknologi yang memadai, mereka menghadapi tantangan signifikan dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya manusia. Selain itu, pelaksanaan strategi yang didasarkan pada pemahaman budaya lokal sering terhambat oleh perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesenjangan dalam pengetahuan budaya di antara personel intelijen. Untuk mengatasi tantangan ini, studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan budaya bagi personel, perbaikan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif.

**Kata kunci:** manajemen budaya, intelijen, Papua, keamanan nasional.

### *Abstract*

*Papua and Central Papua present complex challenges, including diverse socio-cultural dynamics and significant separatist activities. The objective of this study is to analyze the planning, organization, and implementation of cultural management in intelligence operations within these regions and to evaluate the factors influencing the effectiveness of these operations. The findings indicate that while intelligence units possess a deep understanding of local dynamics and adequate technological support, they face significant challenges in coordinating with local*

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

*governments and managing human resources. Furthermore, the implementation of strategies based on local cultural understanding is often hindered by differing priorities between central and local governments, as well as gaps in cultural knowledge among intelligence personnel. To address these challenges, the study recommends enhancing cultural training for personnel, improving inter-agency coordination, and developing more adaptive and participatory policies.*

**Keywords:** *cultural management, intelligence, Papua, national security.*

## PENDAHULUAN

Meningkatnya perhatian terhadap penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional menjadi suatu fenomena yang perlu dicermati. Di Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis, pengelolaan keberagaman ini menjadi kunci dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi, terutama dalam ranah agama, dapat memicu konflik horizontal dan ekstremisme yang mengancam NKRI. Selain itu, potensi kejahatan, gangguan kamtibmas, dan terorisme juga menjadi perhatian serius dalam menjaga keamanan nasional. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keutuhan NKRI. Situasi ini telah menciptakan ketidakstabilan, menghambat pembangunan, dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat Papua.

Meskipun Papua telah menjadi bagian dari Indonesia, wilayah ini masih menghadapi berbagai konflik dan tantangan serius yang memerlukan perhatian mendalam. Konflik di Papua dan Papua Tengah telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai aspek yang memicu dan memperpanjang ketegangan di wilayah tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu paling mencolok yang sering menjadi perhatian nasional dan internasional. Berbagai laporan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

menunjukkan adanya tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap masyarakat lokal, seperti penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum yang jelas, dan pembunuhan di luar proses hukum. Kasus-kasus seperti penembakan oleh kelompok separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) juga sering terjadi, misalnya penyerangan terhadap pos-pos keamanan dan warga sipil di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua Tengah.

Tindakan kekerasan ini tidak hanya menambah jumlah korban jiwa tetapi juga menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat lokal. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal juga menjadi salah satu sumber konflik yang signifikan. Masyarakat pendatang, yang mayoritas berasal dari Jawa, Sulawesi, dan daerah lain di Indonesia, sering kali mendominasi sektor ekonomi formal seperti perdagangan, pertambangan, dan jasa. Sementara itu, masyarakat lokal Papua kerap tertinggal dalam akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang memperdalam ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Kesenjangan ini diperburuk oleh program transmigrasi yang dilihat oleh sebagian masyarakat Papua sebagai upaya "Jawanisasi," yang mengancam identitas budaya mereka.

Dalam upaya untuk mengatasi konflik ini, berbagai pendekatan telah diterapkan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu upaya penting dalam penyelesaian konflik Papua adalah pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otsus memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah Papua dalam mengatur urusan lokal dan alokasi dana yang lebih besar. Namun, implementasinya juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Isu hak asasi manusia juga menjadi fokus, dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang memicu keprihatinan di tingkat nasional dan internasional. Masyarakat memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan melalui partisipasi aktif mereka, potensi konflik dapat dikelola dengan lebih baik.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan dialog dengan pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik ini. Selain itu, diplomasi juga berperan penting, dengan upaya diplomasi di tingkat internasional untuk mendukung penyelesaian konflik Papua. Salah satu aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam adalah peran satuan intelijen dalam penyelesaian konflik di Papua. Satuan intelijen di Indonesia, yang mencakup Badan Intelijen Nasional (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

Meskipun upaya ini terus dilakukan, efektivitas peran intelijen dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Papua sering kali dipertanyakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Di tengah kondisi ini, peran intelijen menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Namun, efektivitas peran intelijen dari sudut pandang pemerintah daerah sering kali dipertanyakan. Meskipun satuan intelijen berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, hasilnya sering kali dinilai tidak optimal. Beberapa pihak menganggap bahwa intelijen belum mampu sepenuhnya memahami kompleksitas budaya dan dinamika sosial di Papua, yang merupakan faktor kunci dalam penyelesaian konflik.

Dinamika pemerintahan daerah di wilayah pegunungan tengah Papua juga menjadi faktor penting dalam memicu dan memperburuk situasi di sana. Fakta menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah daerah, termasuk bupati, wakil bupati, dan kepala dinas, sering kali jarang berada di tempat. Sebaliknya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar Papua, seperti di Jakarta, Bandung, atau bahkan di luar negeri selama berbulan-bulan. Ketidakhadiran mereka menyebabkan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan baik, program pembangunan terbengkalai, dan layanan publik tidak optimal. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

daerah yang seharusnya mencerminkan kondisi nyata sering kali dibuat oleh konsultan dan berhasil memperoleh status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) meskipun faktanya kondisi di lapangan jauh dari memadai. Kondisi sosial-budaya masyarakat pedalaman di Papua Tengah menunjukkan keterasingan mereka dari simbol-simbol nasional Indonesia. Banyak masyarakat yang lebih mengenal bendera Bintang Kejora sebagai lambang identitas mereka, bukan Merah Putih. Lagu kebangsaan yang mereka kenal juga bukan "Indonesia Raya," melainkan "Papua Merdeka." Fenomena ini mencerminkan kegagalan integrasi nasional di tingkat akar rumput dan menegaskan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dalam kebijakan pemerintah pusat.

Optimalisasi manajemen kultur pada satuan intelijen dalam penyelesaian konflik Papua menjadi pendekatan yang penting. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang budaya lokal Papua, termasuk bahasa, adat istiadat, agama, dan nilai-nilai masyarakat Papua. Satuan intelijen perlu mampu berkomunikasi dengan efektif, dengan mengutamakan mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, manajemen informasi yang akurat dan aman adalah kunci dalam menjaga keberhasilan operasi intelijen. Dalam konteks Papua, penggunaan kebijakan yang bersifat persuasif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi sangat relevan.

Pendekatan ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan menjaga harga diri masyarakat Papua. Pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya, nilai-nilai lokal, dan aspirasi masyarakat Papua menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan upaya penyelesaian konflik. Dalam hal ini, konsep manajemen kultur dalam satuan intelijen menjadi relevan untuk dikaji. Manajemen kultur merujuk pada proses pengelolaan, pemahaman, dan pemanfaatan informasi budaya untuk mendukung tujuan organisasi. Optimalisasi manajemen kultur dalam satuan intelijen berpotensi meningkatkan efektivitas dalam memahami akar masalah konflik dan merumuskan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

strategi yang sesuai dengan konteks lokal.

Pentingnya kerja sama dan koordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, juga tak bisa diabaikan. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, optimalisasi manajemen kultur pada satuan intelijen membantu dalam mencapai penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan di Papua, serta mendukung tujuan menjaga keutuhan NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen kultur dalam satuan intelijen dapat dioptimalkan untuk mendukung penyelesaian konflik di Papua dan menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengkaji praktik-praktik manajemen kultur saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi perbaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam bidang manajemen intelijen dan penyelesaian konflik.

Demikian, dalam rangka menjawab tantangan terkait penyebaran radikalisme, intoleransi, dan potensi konflik di Papua serta menjaga keutuhan NKRI, manajemen kultur dalam Satuan Intelijen menjadi bagian penting dari strategi nasional. Dengan berfokus pada pemahaman budaya dan partisipasi masyarakat, diharapkan upaya penyelesaian konflik dan pemeliharaan keamanan nasional dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah metode untuk dapat mengeksplorasi serta memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif cenderung melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, mengajukan pertanyaan dan prosedur, menganalisis data secara induktif mulai tema khusus ke umum dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kenyataan melalui

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

proses berpikir induktif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu dapat ditarik kesimpulan. Melalui penelitian kualitatif dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan penelitian yang langsung pada objek, serta tema yang menonjolkan permasalahan sosial.

## **KERANGKA TEORI**

Kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana optimalisasi manajemen kultur dalam satuan intelijen di wilayah Papua dan Papua Tengah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh satuan intelijen dalam menjalankan operasinya di wilayah yang kompleks, baik dari segi sosial-budaya, resistensi terhadap kebijakan pemerintah pusat, maupun kondisi geografis yang menantang. Bagian pertama dari kerangka ini mengidentifikasi tiga tantangan utama: perbedaan nilai dan norma sosial-budaya, resistensi masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah pusat, serta kondisi geografis yang sulit. Tantangan ini menciptakan berbagai kendala dalam efektivitas operasi intelijen di Papua dan Papua Tengah. Pertanyaan penelitian yang diusulkan berfokus pada bagaimana manajemen kultur dalam satuan intelijen dapat direncanakan dan diorganisasikan untuk menangani konflik di Papua.

Selain itu, pertanyaan ini juga mencakup bagaimana sumber daya dan koordinasi dapat diatur untuk mengimplementasikan manajemen kultur yang efektif dalam satuan intelijen guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Proses penelitian yang diusulkan terdiri dari tiga langkah utama. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan sosial-budaya dalam manajemen kultur di satuan intelijen di Papua dan Papua Tengah. Langkah kedua melibatkan penilaian terhadap pengaruh kebijakan dan pendekatan pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal. Langkah ketiga adalah menilai strategi adaptasi dan kolaborasi yang telah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

diterapkan untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Teori-teori yang mendasari penelitian ini meliputi teori manajemen kultur dalam pemerintahan, teori pemerintahan adaptif, dan teori ketahanan nasional. Ketiga teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami dan mengembangkan strategi yang responsif dan adaptif terhadap kondisi lokal di Papua dan Papua Tengah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Output yang diharapkan dari penelitian ini mencakup pengembangan model manajemen kultur yang sesuai dengan kondisi lokal, peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, serta optimalisasi ketahanan nasional. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keamanan dan stabilitas di Papua dan Papua Tengah, sehingga mendukung keutuhan NKRI secara berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Manajemen Kultur dalam Satuan Intelijen**

Perencanaan manajemen kultur dalam satuan intelijen di wilayah Papua dan Papua Tengah merupakan komponen vital dalam menjalankan operasi keamanan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan manajemen kultur di satuan intelijen bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi keamanan yang dilakukan oleh TNI dan institusi terkait lainnya dapat selaras dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat lokal. Salah satu bentuk nyata dari perencanaan ini adalah pelatihan khusus bagi personel intelijen untuk memahami budaya dan adat istiadat setempat, sehingga dapat mengurangi risiko ketegangan antara militer dan masyarakat lokal. Pendekatan berbasis budaya ini menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas sosial di Papua yang terdiri dari ratusan suku dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan menunjukkan adanya berbagai upaya untuk mengintegrasikan sensitivitas budaya ke dalam setiap aspek operasional. Misalnya, personel intelijen yang ditempatkan di Papua dan Papua Tengah diberikan pembekalan mengenai adat istiadat, bahasa, serta struktur sosial masyarakat Papua sebelum mereka melaksanakan tugas. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat lokal, serta untuk membangun kepercayaan yang diperlukan dalam menjalankan operasi yang membutuhkan dukungan masyarakat setempat. Namun demikian, evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan, seperti kurangnya keterlibatan langsung dari tokoh-tokoh adat dalam proses perencanaan, yang menyebabkan kurang optimalnya integrasi budaya lokal dalam beberapa operasi. Keberhasilan perencanaan manajemen kultur dalam satuan intelijen di Papua dan Papua Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Salah satu faktor utama adalah pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial-budaya di wilayah ini. Tanpa pemahaman yang kuat, upaya untuk mengintegrasikan aspek budaya ke dalam operasi keamanan dapat menjadi kontra-produktif, menyebabkan resistensi dari masyarakat lokal, dan bahkan memicu ketegangan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi satuan intelijen untuk memiliki akses ke informasi yang akurat dan komprehensif mengenai konteks sosial di daerah operasi.

Kompetensi personel juga merupakan faktor kritis dalam memastikan keberhasilan perencanaan manajemen kultur. Personel intelijen yang bertugas di Papua harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, dan pengetahuan yang memadai tentang kultur lokal. Tanpa kompetensi ini, mereka mungkin akan kesulitan dalam menjalankan tugas dengan cara yang tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, program pelatihan yang berkelanjutan dan spesifik untuk tugas di Papua sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi personel.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Koordinasi antar-lembaga juga mempengaruhi efektivitas perencanaan manajemen kultur. Dalam banyak kasus, operasi intelijen di Papua melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah. Koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung pendekatan budaya yang digunakan dalam operasi. Tanpa koordinasi yang baik, bisa terjadi tumpang tindih atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan strategi di lapangan, yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya keamanan yang dilakukan.

Implementasi perencanaan manajemen kultur di satuan intelijen di Papua dan Papua Tengah telah menunjukkan beberapa keberhasilan, terutama dalam hal meningkatkan hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Misalnya, keberhasilan dalam menjalin dialog dengan tokoh adat dan agama di beberapa daerah konflik menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan membangun kerjasama dalam menjaga stabilitas. Keberhasilan lainnya termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program keamanan yang dijalankan oleh pemerintah, yang menandakan adanya kepercayaan yang lebih besar terhadap aparat keamanan.

Namun, implementasi perencanaan ini juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan yang signifikan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan realitas di lapangan. Kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan secara penuh kondisi lokal sering kali tidak dapat diterapkan dengan baik di lapangan, dan bahkan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Selain itu, masalah logistik dan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa bagian Papua dan Papua Tengah juga menjadi hambatan dalam implementasi strategi yang efektif. Kesulitan akses ke daerah-daerah terpencil membuat distribusi informasi dan pelaksanaan operasi di daerah tersebut menjadi kurang optimal.

Hambatan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

tingkat lokal. Meskipun ada program pelatihan untuk personel intelijen, namun jumlah personel yang memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja di lingkungan yang kompleks seperti Papua masih terbatas. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi personel yang ada, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas mereka.

### **Pengorganisasian Sumber Daya dan Koordinasi dalam Implementasi Manajemen Kultur**

Pengorganisasian sumber daya merupakan komponen krusial dalam memastikan bahwa operasi intelijen di Papua dan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks operasi intelijen, sumber daya yang dimaksud mencakup personel, teknologi, informasi, dan logistik yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas operasional. Pengorganisasian sumber daya ini harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial-budaya yang ada di Papua, mengingat tantangan yang dihadapi di wilayah ini sangat kompleks dan beragam.

Salah satu aspek penting dalam pengorganisasian sumber daya adalah penempatan personel yang kompeten dan terlatih di posisi-posisi strategis. Personel intelijen yang ditempatkan di Papua harus memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika lokal, serta keterampilan yang memadai untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sering kali tidak stabil. Program pelatihan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek-aspek seperti penguasaan bahasa daerah, pemahaman tentang adat istiadat setempat, dan kemampuan untuk melakukan analisis intelijen yang mendalam, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa personel yang ditugaskan memiliki kapasitas yang sesuai dengan tuntutan lapangan.

Selain personel, teknologi juga menjadi sumber daya yang sangat penting dalam mendukung operasi intelijen di Papua. Penggunaan teknologi canggih, seperti perangkat pengawasan elektronik, penginderaan jauh, dan komunikasi terenkripsi,

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

memungkinkan satuan intelijen untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga membantu mengatasi beberapa kendala geografis yang dihadapi, seperti medan yang sulit diakses dan kondisi cuaca yang tidak menentu, yang sering kali menghambat mobilitas personel di lapangan. Namun, pengorganisasian teknologi ini juga memerlukan perencanaan yang matang, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pembaruan peralatan yang digunakan, serta pelatihan personel dalam penggunaan teknologi tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi, pelatihan, dan adaptasi kebijakan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selain itu, program pelatihan bagi personel intelijen perlu diperkuat, terutama dalam hal pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan kultur lokal. Terakhir, kebijakan yang diterapkan harus lebih adaptif dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan dan dapat mendukung upaya untuk menjaga stabilitas di wilayah Papua dan Papua Tengah.

Perencanaan manajemen kultur dalam satuan intelijen di Papua dan Papua Tengah memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Meskipun telah ada beberapa keberhasilan, namun masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa operasi keamanan di wilayah ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat pemahaman budaya, meningkatkan kompetensi personel, dan memperbaiki koordinasi antar-lembaga, diharapkan bahwa satuan intelijen dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua dan Papua Tengah.

Koordinasi yang baik juga memberikan keuntungan strategis dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi. Ketika satuan intelijen dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik, kebijakan yang diterapkan cenderung lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini sangat penting di Papua,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

di mana dinamika sosial-budaya sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah operasi keamanan. Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan, operasi yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat setempat.

Namun, perlu diakui bahwa pengorganisasian dan koordinasi ini juga menghadapi berbagai hambatan, seperti birokrasi yang berbelit-belit, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi efektivitas operasi dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan keamanan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki mekanisme pengorganisasian dan koordinasi, termasuk dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan, serta dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung operasi intelijen di Papua.

Pengorganisasian sumber daya dan koordinasi yang efektif antara satuan intelijen dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam memastikan bahwa operasi keamanan di Papua dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan didukung oleh pengorganisasian yang baik, diharapkan keamanan di Papua dapat terjaga dan berbagai ancaman terhadap stabilitas nasional dapat diatasi dengan lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perencanaan manajemen kultur dalam satuan intelijen di Papua dan Papua Tengah telah mengalami beberapa kemajuan signifikan, namun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan operasional. Pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-budaya lokal telah menjadi salah satu kekuatan utama yang memungkinkan satuan intelijen untuk beradaptasi dengan

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

kondisi yang kompleks di wilayah tersebut. Pemahaman ini didukung oleh pelatihan intensif yang diberikan kepada personel mengenai adat istiadat dan norma masyarakat Papua, yang terbukti efektif dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat setempat. Selain itu, dukungan teknologi yang kuat, termasuk penggunaan penginderaan jauh dan sistem komunikasi canggih, telah memperkuat kapasitas intelijen untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan data di daerah-daerah yang sulit diakses.

Namun, kelemahan dalam pemahaman budaya yang belum merata di antara personel, serta keterbatasan sumber daya di beberapa daerah, tetap menjadi kendala utama yang mempengaruhi efektivitas operasi. Tantangan-tantangan ini terutama terlihat dalam hal koordinasi antara satuan intelijen dan pemerintah daerah, yang sering kali dihambat oleh perbedaan prioritas dan perspektif. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi melalui forum-forum koordinasi rutin, masih terdapat kesenjangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Melalui analisis SWOT/TOWS, telah diidentifikasi bahwa strategi berbasis kekuatan internal seperti peningkatan kolaborasi dengan tokoh adat dan penggunaan teknologi geospasial mampu meminimalisir dampak dari ancaman eksternal seperti aktivitas separatis dan tantangan geografis yang sulit. Sebaliknya, strategi untuk mengatasi kelemahan internal melalui pelatihan budaya lokal yang lebih intensif dan perbaikan koordinasi antara lembaga dapat memperkuat respons satuan intelijen terhadap tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya dan koordinasi yang lebih baik antara satuan intelijen dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasi keamanan di Papua. Dengan terus memperbaiki pendekatan manajemen kultur dan memanfaatkan peluang yang ada, satuan intelijen diharapkan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Papua dan Papua Tengah.

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Schein, E. H. (2017). *Organizational Culture and Leadership* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey- Bass.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. (2003). *Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution*. Centre for Strategic and International Studies.
- Lexi J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2019). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2024). *Managing Conflict In Papua: Suggestions For A New President*. IPAC.
- Y. Wahyu Saronto. (2018). *Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Penerbit Andi.
- Aditjondro, G. J. (2009). *Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka)*. Diakses dari <http://tangisantanah.blogspot.com/2009/05/sejarah-opm-organisasi-papua-merdeka.html>.
- Gatra. (2021). *Pengamat Nilai Perlu Optimalisasi Peran Intelijen di Papua*. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-511345-hukum-pengamat-nilai-perlu-optimalisasi-peran-intelijen-di-papua.html> pada 20 April 2024.
- Crayonpedia. (2014). *Bab 6 Konflik Sosial*. Diakses dari [https://www.crayonpedia.org/mw/Bab6\\_konflik\\_sosial\\_tahun\\_2014](https://www.crayonpedia.org/mw/Bab6_konflik_sosial_tahun_2014).
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial.
- Naskah Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, Nomor: Kep/474/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012, hal. 94.